



Judul : Usulan Hak Memilih Menjadi Wajib Memilih, Apa Mungkin?
Tanggal : Selasa, 04 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Revisi UU Pemilu

Usulan Hak Memilih Menjadi Wajib Memilih, Apa Mungkin?

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Rencananya, revisi akan dilakukan tahun 2026.

Ada beberapa isu yang selalu menjadi perhatian khusus bagi partai politik di Senayan maupun di luar Senayan, di antaranya ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Lalu, sistem pemilu dan aturan verifikasi bagi partai politik. Bahkan, Partai Persatuan

Indonesia (Perindo) mendesak DPR untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

"Kami mendorong pemerintah dan DPR saat ini untuk segera melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Itu hal yang sangat penting dan akan kita bahas di Rakernas," ujar Sekretaris Jenderal Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Minggu (2/11/2025) malam.

Ferry menyinggung partainya yang tidak mendapatkan kursi di

DPR akibat ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* 4 persen.

Sebelumnya, sebanyak 12 partai politik yang tidak lolos ke DPR dalam Pemilu 2024 membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, pada Kamis (25/9/2025). Sekber tersebut dibentuk untuk memperjuangkan dihapusnya ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* (PT) pada Pemilu.

Faktanya, selain yang dipermasalahkan mengenai angka ambang batas parlemen, ada juga usulan agar di dalam revisi UU Pemilu mendatang memasukan klausul kewajiban memilih.

Usulan itu diungkapkan oleh Ketua Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Golkar, Syahmud Ngabalin. "Kami memandang bahwa perubahan dari hak pilih menjadi wajib pilih," usulnya.

Sementara, peneliti Komite Independen Pemantau Pemilu

(KIPP) Kaka Suminta menolak keras perubahan dari hak memilih menjadi kewajiban memilih.

Menurut dia, jika kewajiban memilih diberlakukan di Indonesia akan menimbulkan masalah baru dalam sistem demokrasi yang ada.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana pendapat dan pandangan Kaka Suminta dan Syahmud Ngabalin terkait dengan usulan hak memilih menjadi kewajiban memilih di pemilu mendatang, berikut wawancaranya.

SYAHMUD NGABALIN, Ketua BSN Partai Golkar

Demokrasi Kuat Lahir Bila Rakyatnya Aktif



SURABAYA: OGI WIDIAJATI

“

Demokrasi hanya bermakna bila rakyat ikut serta, bukan diam dan menyerahkannya kepada segelintir suara yang aktif.

DPR dan Pemerintah akan membahas mengenai RUU Pemilu. Infonya, Partai Golkar mengusulkan isu terkait hak pilih di pemilu?

Begitu. Dalam setiap negara demokrasi, hak memilih adalah simbol kedaulatan rakyat.

Namun bagi BSNPG, hak itu tidak cukup hanya disebut "hak", melainkan juga tanggung jawab moral dan kewajiban kebangsaan.

Karena sejatinya, kedaulatan tidak akan pernah hidup bila rakyat apatis terhadap nasib bangsanya sendiri.

Maksud Anda, di dalam RUU Pemilu nanti dimasukkan hak pilih menjadi wajib memilih?

Iya benar. Kami memandang bahwa perubahan dari hak pilih menjadi wajib pilih bukanlah pembatasan kebebasan, melainkan penguatan peran rakyat dalam menentukan arah bangsa.

Demokrasi hanya bermakna bila rakyat ikut serta, bukan diam dan menyerahkannya kepada segelintir suara yang aktif.

Partisipasi politik bukan hanya pilihan individu, tetapi juga manifestasi cinta tanah air.

Apa yang Anda harapkan dari hak pilih menjadi wajib pilih?

Dengan menjadikan hak pilih sebagai kewajiban, kami ingin menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab yang sama untuk

menjaga masa depan republik, bukan sekadar menonton dari pinggir sejarah.

Bukan kah jika hak pilih menjadi wajib pilih sebagai bentuk paksaan kepada masyarakat?

Langkah ini bukanlah upaya memaksa, melainkan ajakan untuk menegakkan kembali makna sejati demokrasi: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dalam pandangan kami, memilih bukan hanya soal menentukan pemimpin, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan cita-cita kemerdekaan agar suara rakyat tidak lenyap, dan arah bangsa tidak dikuasai oleh golongan yang sedikit namun bersuara keras. ■ REN

KAKA SUMINTA, Peneliti KIPP

Sejatinya Demokrasi Itu Memberi Kebebasan



SURABAYA: OGI WIDIAJATI

“

Karena sejatinya demokrasi itu memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk hak memilih bukan wajib memilih.

Ada usulan dari Partai Golkar terkait hak pilih menjadi wajib pilih. Apa pendapat Anda?

Soal hak pilih menjadi wajib pilih itu memang menjadi pilihan, tetapi di dalam sejarah berbangsa dan bernegara, kita lebih mengenal hak untuk memilih bukan kewajiban memilih.

Karena sejatinya demokrasi itu memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk hak memilih bukan wajib memilih.

Apakah ada dampaknya jika hak pilih berubah menjadi wajib pilih?

Kalau di dalam demokrasi hak pilih menjadi wajib pilih, maka konsekwensinya panjang.

Apa saja?

Salah satunya adalah budaya demokrasi di Indonesia yang berbeda dan akan membuat gejalak jika diubah. Kedua, jika wajib pilih, maka pastinya akan ada konsekuensi hukum jika dilanggar oleh masyarakat jika tidak menggunakan pilihannya.

Jika demikian akan berpotensi menimbulkan masalah baru, dong?

Iya, Wajib pilih secara otomatis akan membuat problem baru.

Lagian, perubahan hak pilih menjadi wajib pilih tidak ada alasan yang kuat. Selama ini angka partisipasi masyarakat cukup tinggi. Di Pemilu lalu, mencapai 81 persen, dan di

Pilkada 70 persen.

Jika problemnya supaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat lebih tinggi, maka sistem pemilu harus diperbaiki, pemerintahan dibersihkan, partai politik juga diperbaiki.

Kalau semua itu diperbaiki, maka publik akan dengan sendirinya menggunakan hak pilihnya.

Lalu, apa saran Anda?

Lebih baik berhenti untuk mengusulkan ide atau wacana yang menimbulkan kontroversi. Hentikan wacana tersebut karena buang-buang umur dan energi saja.

Fokus saja pada isu-isu yang saat ini menjadi perhatian masyarakat. ■ REN